



Fast Track PARITAS GENDER: DAPAT DICAPAI?

¡Hola, compas de CWI!

Sejumlah negara Amerika Latin memiliki pengalaman menjalankan **kebijakan 'fast track'** untuk mencapai paritas gender, yaitu keseimbangan jumlah perempuan dan laki-laki pada jabatan politik (50:50).

Perjuangan dalam mewujudkan **paritas gender** (kesetaraan gender) berbeda-beda untuk masing-masing negara.

Bagaimana pengalaman tiga negara, **Argentina, Brazil dan Meksiko** dalam menjalankan kebijakan *fast track* ini? Hal apa yang bisa direfleksikan dari pengalaman negara-negara tersebut? Kemudian bagaimana dengan Indonesia?



**Simak yuk
selengkapnya!**

Kebijakan “Fast Track” menstimulasi percepatan tercapainya paritas gender melalui kebijakan afirmatif dan kuota gender daripada menunggu sampai puluhan bahkan ratusan tahun untuk peningkatan bertahap keterwakilan perempuan di politik. Partai politik sebagai aktor utama pelaksana terus mempertahankan hierarki kekuasaan yang meminggirkan perempuan.

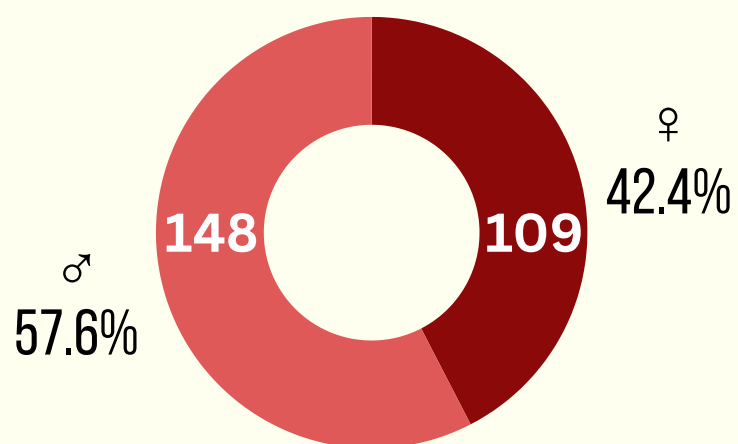
Negara-negara yang menerapkan *fast track* seperti **Argentina (1991)**, **Meksiko (1996)**, dan **Brazil (1997)** bersedia menerapkan kebijakan afirmatif untuk meningkatkan representasi numerik perempuan karena **mengakui adanya bias gender yang memarjinalisasi perempuan dalam politik**. Kuota perempuan di Argentina dan Meksiko mencapai paritas gender atau di ambang 50%



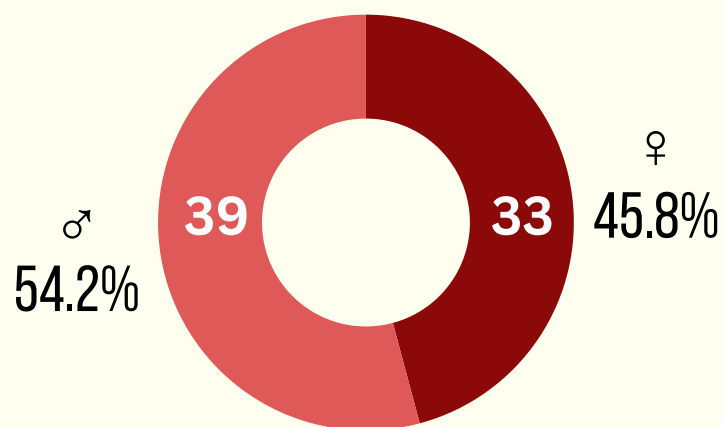
Argentina merupakan **negara pertama di dunia** yang mengambil langkah menuju paritas gender dengan mengadopsi kuota gender 30% dalam Konstitusi untuk pencalonan anggota legislatif perempuan pada tahun **1991**.

Selama 20 tahun, perjuangan menuju paritas gender dilakukan dengan memperjuangkan penempatan calon perempuan di posisi yang efektif hingga peningkatan representasi di legislatif. **Hal ini dilakukan dengan negosiasi, desakan publik, hingga gugatan hukum (konstitusional).**

Pada 2017 Argentina mengeluarkan UU Paritas Gender dalam Representasi Politik dimana secara hukum telah mewajibkan komposisi 50% calon perempuan dalam pemilu. Kini, Argentina menjadi salah satu negara dengan **paritas gender penuh di lembaga legislatif walaupun persentase perempuan yang benar-benar terpilih masih dibawah 50% dan belum di seluruh ranah (eksekutif dan yudikatif)** seperti Meksiko.

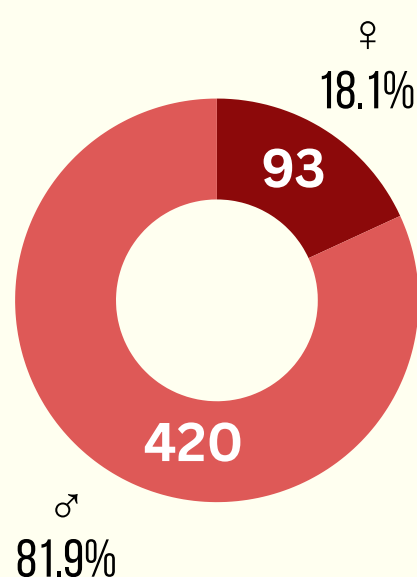


Majelis Rendah (Legislatif)



Majelis Tinggi (Legislatif)

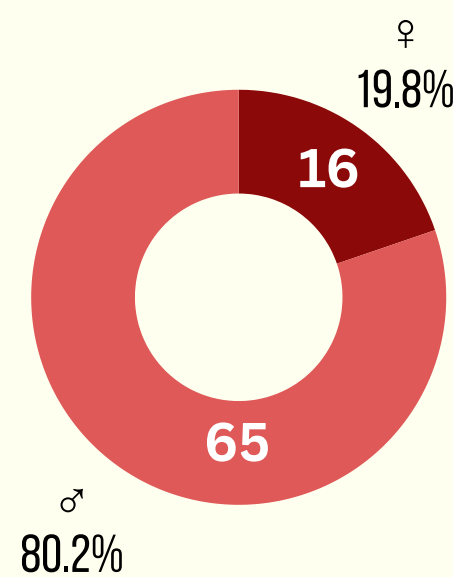
Brazil juga merupakan negara dengan *fast track* yang mengadopsi kuota gender pada pencalonan sebesar 25% pada 1997 yang kemudian dinaikkan menjadi 30% pada tahun 2000.



Majelis Rendah
(Legislatif)

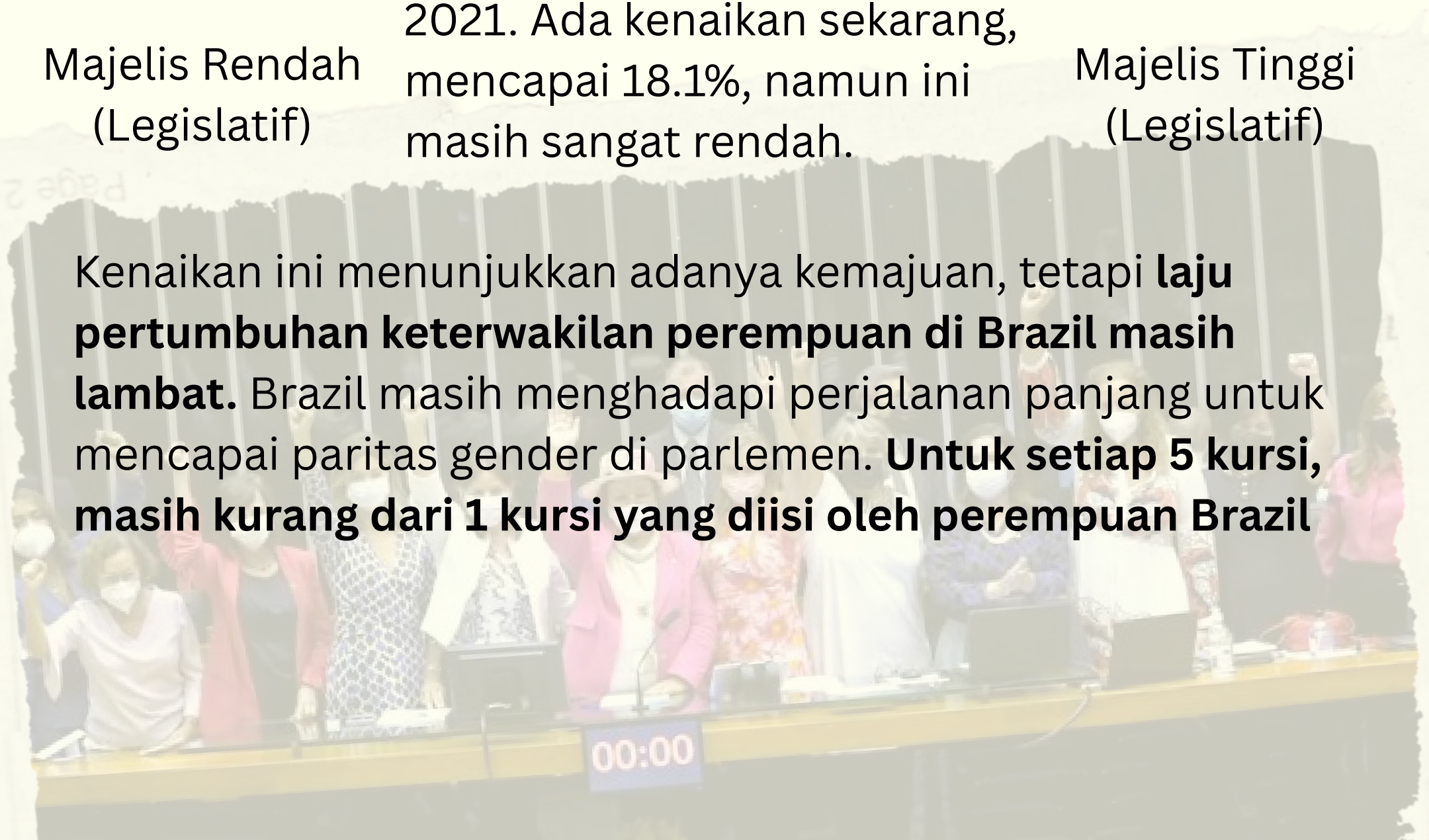
Namun paritas gender masih belum tercapai di Brazil

meskipun pencalonan perempuan terus meningkat. Jumlah perempuan di Chamber of Deputies Brazil hanya 15.2% pada tahun 2021. Ada kenaikan sekarang, mencapai 18.1%, namun ini masih sangat rendah.



Majelis Tinggi
(Legislatif)

Kenaikan ini menunjukkan adanya kemajuan, tetapi **laju pertumbuhan keterwakilan perempuan di Brazil masih lambat**. Brazil masih menghadapi perjalanan panjang untuk mencapai paritas gender di parlemen. **Untuk setiap 5 kursi, masih kurang dari 1 kursi yang diisi oleh perempuan Brazil**

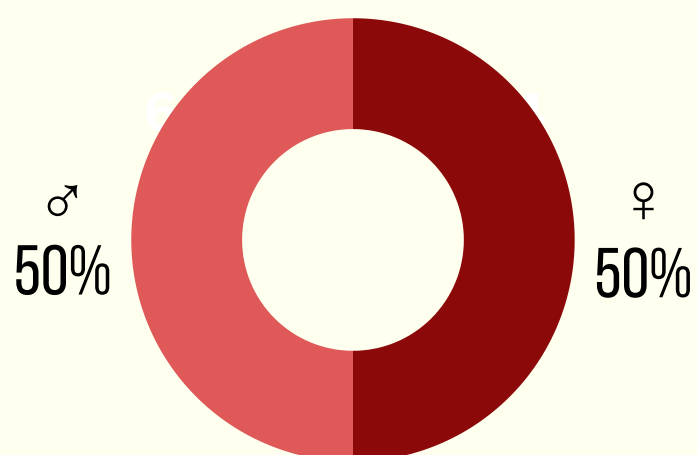


Meksiko memulai perjuangan menuju gender paritas pada 1996 dengan menetapkan kebijakan agar partai politik mencalonkan 30% perempuan. Kebijakan ini terus diperkuat pada 2002. Pada 2008, kuota pencalonan diperkuat menjadi 40%.

Pada 2014 mulai didorong paritas gender untuk pencalonan legislatif nasional dan negara bagian, dengan mengadopsi aturan ini di dalam Konstitusi.



Majelis Rendah
(Legislatif)



Majelis Tinggi
(Legislatif)

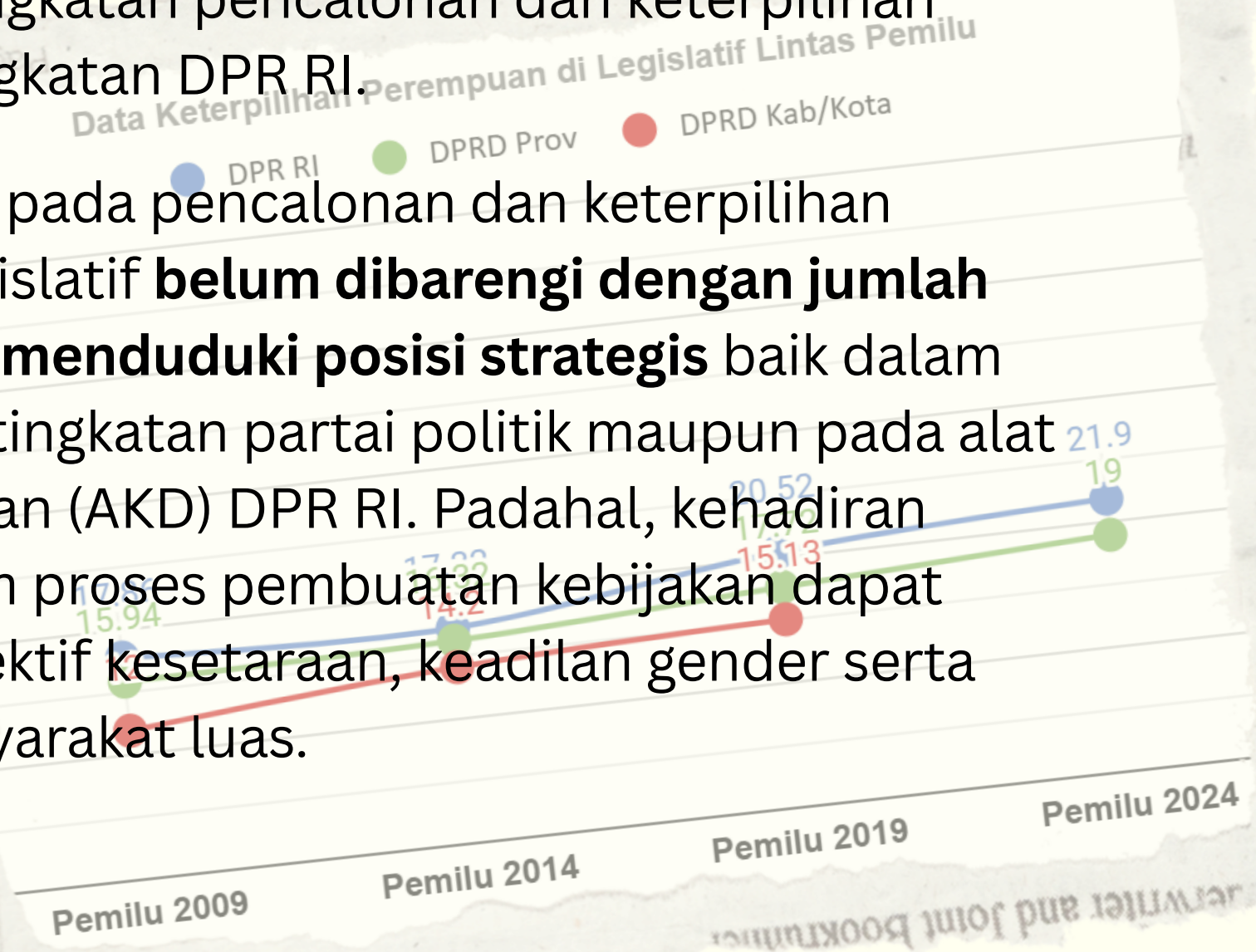
Tahun 2019 juga menjadi pijakan penting bagi Meksiko karena terbentuknya **Mujeres en Plural** yaitu koalisi perempuan lintas partai yang mendorong Kongres untuk menyetujui kebijakan **Gender Parity in Everything**. Kebijakan tersebut mencakup seluruh jabatan penting negara, termasuk di bidang hukum, pimpinan partai, hingga pemerintahan indigeneous (pemerintahan yang diatur hukum adat).

Bagaimana dengan Indonesia?



Indonesia mengadopsi kebijakan afirmasi menjelang Pemilu 2004. **Kebijakan afirmasi hadir dalam UU Pemilu yang mendorong minimal 30% pencalonan perempuan di legislatif semua tingkatan (DPR RI, DPRD Prov, DPRD Kab/Kota) dan UU Partai Politik yang mendorong keterwakilan perempuan dalam kepengurusan partai politik. Kebijakan afirmasi terus diperkuat** (UU Pemilu mengatur penempatan 1 perempuan dari 3 calon dalam daftar calon jelang Pemilu 2009, serta penguatan di PKPU pada 2014 dan 2019). Penguatan kebijakan afirmasi pada pencalonan perempuan terbukti mendorong peningkatan pencalonan dan keterpilihan perempuan di tingkatan DPR RI.

Tren peningkatan pada pencalonan dan keterpilihan perempuan di legislatif **belum dibarengi dengan jumlah perempuan yang menduduki posisi strategis** baik dalam kepengurusan di tingkatan partai politik maupun pada alat kelengkapan dewan (AKD) DPR RI. Padahal, kehadiran perempuan dalam proses pembuatan kebijakan dapat membawa perspektif kesetaraan, keadilan gender serta kepentingan masyarakat luas.





CAKRA WIKARA INDONESIA

APA YANG BISA DIPELAJARI DARI ARGENTINA, BRAZIL DAN MEKSIKO?

- Perjuangan mewujudkan paritas gender harus dilakukan dengan konsisten berdasarkan strategi jangka panjang
- Menjamin kekuatan hukum dengan mengadopsi kebijakan afirmatif dalam Konstitusi
- Pentingnya aliansi lintas sektor dan negosiasi serta desakan publik
- Partai politik masih menjadi penghambat utama, upaya mencapai paritas gender tidak bisa bergantung pada partai

Argumen yang menentang paritas gender antara lain: partai politik mengklaim mengalami kesulitan karena tidak tersedia perempuan berkualitas untuk dicalonkan atau ditempatkan pada posisi tertentu. Ini merupakan pandangan yang bias, padahal kualitas dan kompetensi tidak pernah ditanyakan kepada laki-laki.

Belajar dari ketiga negara Amerika Latin tersebut, keberhasilan paritas gender menuntut strategi jangka panjang, aliansi lintas partai dan aktor, penegakan hukum yang tegas, serta dukungan publik untuk memastikan kebijakan kuota benar-benar dijalankan.

WHAT'S NEXT?

Pengalaman penerapan kebijakan paritas gender di Amerika Latin nyatanya telah berhasil mendorong peningkatan signifikan jumlah perempuan di politik, baik di lembaga legislatif, eksekutif pada tingkat nasional maupun lokal. Indonesia juga secara perlahan mengalami peningkatan keterwakilan jumlah perempuan di legislatif walaupun belum mencapai 30%.

Peningkatan jumlah keterwakilan perempuan di legislatif perlu terus didorong ke depannya, mengingat trennya terus mengalami peningkatan namun sebenarnya jumlahnya masih jauh tertinggal dibandingkan dengan laki-laki.

Mendorong peningkatan jumlah seharusnya dibarengi dengan penguatan komitmen partai politik sebagai aktor penting demokrasi untuk terus meningkatkan kapasitas perempuan yang terjun ke politik.

Reformasi kuota bukanlah ‘obat mujarab’ meskipun jalur yang dianggap konsisten ini dapat mengatasi ketidaksetaraan. Para elit partai akan tetap mencari celah untuk menyasati aturan kuota (Piscopo & Correa 2024).

Penting untuk perlu terus menjalin sinergitas jaringan kelompok perempuan dari berbagai kalangan baik politisi dan masyarakat sipil untuk terus mendukung kebijakan afirmasi.

Referensi



Boston University Global Development Policy Center. (2024, 1 Oktober). Implementing political gender quotas: Lessons from Mexico. Global Development Policy Center. Diakses dari <https://www.bu.edu/gdp/2024/10/01/implementing-political-gender-quotas-lessons-from-mexico/>

Inter-Parliamentary Union. (2025, Juli). Women ranking [Tabel data]. Diakses dari [Wylie, Kristin, Pedro dos Santos, and Daniel Marcelino. 2019. "Extreme Non-Viable Candidates and Quota Maneuvering in Brazilian Legislative Elections." *Opinião Pública* 25 \(1\): 1–28. doi:10.1590/1807-019120192511. <https://www.scielo.br/j/op/a/HM5XsTP4S8dsGmLgdrqd6fq/?lang=en>](#)

Drude Dahlerup & Lenita Freidenvall (2005) Quotas as a 'fast track' to equal representation for women, *International Feminist Journal of Politics*, 7:1, 26-48, DOI: <https://doi.org/10.1080/1461674042000324673>

Margret, anna, dkk (2022). Menyoal Data Representasi Perempuan di Lima Ranah. Cakra Wikara Indonesia <https://cakrawikara.id/wp-content/uploads/2022/03/Buku-Menyoal-Data-Representasi-Perempuan-Edisi-Revisi-05042022-FINAL-Copy.pdf>

Piscopo, J. M. (2020, 22 Oktober). When do quotas in politics work? Latin America offers lessons. *Americas Quarterly*. Diakses dari <https://americasquarterly.org/article/when-do-quotas-in-politics-work-latin-america-offers-lessons/> Piscopo, J. M. (2020, 22 Oktober). When do quotas in politics work? Latin America offers lessons. *Americas Quarterly*. Diakses dari <https://americasquarterly.org/article/when-do-quotas-in-politics-work-latin-america-offers-lessons/>

Piscopo, J. M., & Vázquez Correa, L. (2024). From 30 percent to gender parity in everything: The steady route to raising women's political representation in Mexico. *International Feminist Journal of Politics*, 26(1), 54-80.

Wylie, Kristin, Pedro dos Santos, and Daniel Marcelino. 2019. "Extreme Non-Viable Candidates and Quota Maneuvering in Brazilian Legislative Elections." *Opinião Pública* 25 (1): 1–28. doi:10.1590/1807-019120192511. <https://www.scielo.br/j/op/a/HM5XsTP4S8dsGmLgdrqd6fq/?lang=en>

Franceschet, S., & Piscopo, J. M. (2008). Gender quotas and women's substantive representation: Lessons from Argentina. *Politics & Gender*, 4(3), 393–425. <https://doi.org/10.1017/S1743923X08000342>

Soepardiyanto, D.A. (2025) *Amandemen Konstitusi Tahun 2019 di Meksiko : Studi Kasus Pengesahan Kebijakan "Gender Parity in Everything" (2014-2019)*. (Skripsi tidak diterbitkan) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia.

Ministry of Foreign Affairs, International Trade and Worship Argentine Republic. Argentina passes law on Gender Parity in Political Representation (24 November 2017) <https://cancilleria.gob.ar/en/news/releases/argentina-passes-law-gender-parity-political-representation>